

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Fokus kajian pustaka terdapat pada penelitian terdahulu, hal tersebut agar memperkuat penelitian yang ada. Sehingga aspek substansi dari penelitian terdahulu yang belum diteliti dapat dilakukan pada penelitian yang ada. Kajian pustaka menunjukkan kajian penelitian terdahulu mengenai fenomena wartawan nyaleg. Adanya kajian pustaka terfokuskan pada penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk peneliti dalam menyusun tinjauan teori serta kerangka pemikiran. Sehingga adanya kajian pustaka terdahulu menjadi tolak ukur serta acuan referensi dalam melakukan penelitian.

2.1.1. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

2.1.1.1. Penelitian Terdahulu 1

**Aza Rifda Khamimiya, Agus Machfud. Mochamad Arif Affandi (2023)
Tentang KETERLIBATAN SELEBRITI SEBAGAI POLITISI:
PENGUATAN PARTAI POLITIK ATAU PENGALANGAN SUARA,
Program Studi Sosiologi – Universitas Negeri Surabaya, Jurnal Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (JISIP) Vol. 12 No. 2.**

Penelitian terdahulu ini menggambarkan bahwa negara demokrasi seperti Indonesia pemilihan anggota legislatif melalui proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga rakyat memegang kedaulatan paling tinggi memiliki hak dalam memilih pada pemilihan umum untuk mengungkapkan preferensi mereka tentang siapa

yang harus menjadi wakil mereka di dewan (Nendissa & Rahakbauw, 2020). Tahapan rekrutmen serta kaderisasi partai yang cenderung menggunakan pola serta gaya konvensional menuntun pada peralihan strategi modern sebagai langkah strategis untuk memenangkan kontestasi pemilu. Dalam realitanya, parpol yang mempunyai modal sosial sedikit, kesulitan menangani calon figure ketika menggunakan strategi rekrutmen tradisional. Hal ini menyebabkan partai politik melakukan inovasi dalam perekrutan bakal calon legislatif (Bacaleg) dengan menggandeng tokoh seni ternama (musisi, artis, dan pelawak). Adapun subjek penelitian pada penelitian terdahulu ini adalah ketergabungan Verrel Bramasta pada Partai Amanat Nasional (PAN)

Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian ini dimana tujuan teknik kualitatif tidak lain untuk menggabungkan realitas serta memahami signifikansi dengan berfokus terhadap orang yang terlibat langsung di dalam situasi sosial. Penelitian kualitatif begitu memperhatikan peristiwa, tahapan serta keaslian data (Somantri, 2005). Tujuan penelitian ini ialah membahas tentang rasionalitas parpol memilih artis sebagai caleg serta menjelaskan keberadaan selebritis dalam kelembagaan parpol. Kajian ini menggunakan metode studi kasus, dimana peneliti berusaha mengkaji lebih dalam tentang fenomena Verrel Bramasta, pendatang baru di perpolitikan melalui beragam sumber dalam mengumpulkan data. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, di antaranya, studi dokumen surat kabar online serta audiovisual dari acara harian Narasi Newsroom dan acara harian Kontroversi di Metro TV sebagai data utama dan studi *literature* jurnal yang relevan dengan penelitian, berita *online*, dan buku

elektronik sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi dan menyempurnakan data penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai memilih calon legislator bergantung pada pemilihan individu artis. Artis dipercaya mempunyai peran, serta persona yang mampu menginfluencer parpol untuk mendongkrak popularitas parpol. Dengan perolehan kursi di senayan pada kontestasi pemilu 2024.

2.1.1.2. Penelitian Terdahulu 2

Rieka Mustika, S. Arifianto tentang KOMODIFIKASI “POPULARITAS SELEBRITIS” UNTUK MENDULANG SUARA PEMILU LEGISLATIF 2019 Puslitbag APTIKA dan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Vol. 2 No. 2 tahun 2018.

Penelitian ini berfokus pada perekrutan profesi selebritis menjadi caleg di pemilu 2019. Isu penelitian ini mengacu pada pilihan popularitas artis, parpol pada umumnya mengutamakan aspek persona serta popularitas dibandingkan *skills, knowledge, track record* dan *integrity* dalam memilih bacaleg. Selebritis selalu menjadi *trend center* warga sebab selebritis memiliki karakter dan gaya hidup pujaan masyarakat (Alberoni, 1972). Sehingga ini menjadi pertimbangan parpol dalam merekrut selebritis untuk maju dalam kontestasi pemilu legislatif. Namun begitu, alasan minatnya artis terjun ke dunia politik menjadi perbincangan. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka benar-benar ingin mengabdikan diri dan melayani masyarakat atau hanya sekedar menambah popularitas saat kembali menjadi selebritis nantinya.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa fenomena selebritis yang terjun di dunia politik menjadi strategi modern partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa komodifikasi profesi selebritis di dunia politik. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana menurut (Lincoln, 2009) riset kualitatif mengungkapkan kenyataan yang alami. Maka dari itu, diperlukan fokus pengamatan agar dapat menumbuhkan korelasi antara konteks-konteks serta menjadi suatu pondasi pembahasan utuh di antara fenomena yang dikaji. Riset ini dilakukan dengan metode pengumpulan data yakni, studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini bahwa saat peralihan popularitas artis ditukarkan dengan *value* politik tidak menghasilkan output sejalan. Fenomena artis terjun ke politik mengartikan kurangnya proses kaderisasi di setiap parpol, modifikasi *value* popularitas artis terhadap *value* politik terapan terjadi tetapi dalam substansinya berdampak negatif terhadap masyarakat konstituen yang diwakilinya.

2.1.1.3. Penelitian Terdahulu 3

**Rini Riyantini tentang POPULARITAS ARTIS SEBAGAI POLITISI
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal BINA WIDYA,
Vol. 22 No. 4 Juni, tahun 2011.**

Kepopuleran tokoh/*public figure* di media menjadi segala-galanya bagi masyarakat yang sebagian besar tingkat pendidikannya menengah ke bawah. Seakan masyarakat hanya mengkonsumsi informasi yang diproduksi oleh media.

Fenomena tersebut kemudian menjamur di kalangan politisi yang peka terhadap pemanfaatan media untuk mendongkrak popularitas dan namanya. Tidak hanya memanfaatkan media, politisi ini juga berkolaborasi dengan artis untuk menggaet kepercayaan masyarakat yang notabene artis tersebut merupakan idola khalayak ramai. Artis diyakini dapat meningkatkan perolehan suara dibanding kader biasa. Fenomena ini berdampak pada proses pendewasaan masyarakat dalam pendidikan politik yang perlu untuk ditingkatkan guna mengawal terlaksananya demokrasi di Indonesia. Namun tren artis masuk dalam dunia politik dengan mengandalkan popularitas di dunia *entertainment* (hiburan) tanpa dibekali dengan pengetahuan dan pendidikan politik dapat menjadi “batu sandungan” baginya, partai politik pengusung, bahkan birokrasi di pemerintahan ketika ia menjalankan perannya sebagai tokoh politik nantinya. Langkah antisipasinya adalah jangan sampai artis tersebut menjadi ladang suara (*vote getter*) dari pemangku kepentingan sekelompok orang yang berada di belakang panggung politik.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat tren artis di dunia politik sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan dari hulu ke hilir. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menggali bagaimana fenomena keberhasilan artis dalam meraih suara di dunia politik. Penelitian ini menggunakan teori fungsi media dan komunikasi politik dalam konsep komunikasi massa melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan studi pustaka. Informan pada penelitian adalah masyarakat selaku pemilih di daerah pemilihan yang dimenangkan artis serta kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), keduanya menjadi data primer pada penelitian ini. Sehingga hasil

penelitian ini diperoleh bahwa orientasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya didasarkan pada pertimbangan pengenalan popularitas sebagai kandidat dari aspek penggambaran tokoh di media, tidak memperhatikan kredibilitas, pengalaman politik dan pendidikan kandidat. Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya sebatas sosialisasi teknis pemilu, belum menyentuh aspek ideologi demokrasi.

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Terdahulu I Tentang Keterlibatan Selebriti Sebagai Politisi: Penguatan Partai Politik Atau Penggalangan Suara.

No	Item	Penelitian Terdahulu I
1.	Nama, Tahun, Judul dan Nama Kota	Aza Rifda Khamimiya, Agus Machfud. Mochamad Arif Affandi, Keterlibatan Selebriti Sebagai Politisi: Penguatan Partai Politik Atau Penggalangan Suara, Surabaya
2.	Tujuan Penelitian	Mempelajari alasan mengapa partai memilih selebriti sebagai calon legislator dan bagaimana artis terlibat dalam struktur partai politik.
3.	Pendekatan Penelitian	Kualitatif
4.	Teori	Teori modal milik Bourdieu dan rasionalitas Max Weber digunakan dalam penelitian ini.
5.	Hasil	Partai memilih calon legislator berdasarkan popularitas artis. Artis dipercaya mempunyai kekuatan, dan popularitas sehingga mampu mempengaruhi elektabilitas partai. Keterlibatan selebriti dalam kontestasi pemilu 2024 akan memperkuat partai politik, karena keterlibatan mereka berdasarkan persona mereka.

6.	Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan	● Perbedaan Pada penelitian ini mengkaji bagaimana kehadiran selebriti sebagai pelaku politik dapat menjadi penguat partai politik atau bahkan voting suara. Selain itu, teori dan subjek penelitian pada penelitian terdahulu I dan yang akan peneliti lakukan juga berbeda. ● Persamaan Penelitian ini sama-sama memfokuskan pada bagaimana profesi diluar politisi (selebriti/jurnalis) dapat terlibat secara langsung dalam kontestasi pemilihan umum sebagai peserta Pemilu.
7.	Kritik	Penelitian ini kurang membahas mengenai teori yang digunakan, alangkah baiknya dapat dibahas secara detail tentang teori yang digunakan agar peneliti selanjutnya mudah dalam mempelajari penelitian terdahulu dan tidak bertanya-tanya atas teori dari penelitian ini.

Tabel 2. 2 Matriks penelitian Terdahulu II Tentang KOMODIFIKASI “POPULARITAS SELEBRITIS” UNTUK MENDULANG SUARA PEMILU LEGISLATIF 2019.

No	Item	Penelitian Terdahulu II
1.	Nama, Tahun, Judul dan Nama Kota	Rieka Mustika, S. Arifianto, KOMODIFIKASI “Popularitas Selebritis” Untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019
2.	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui fenomena keberhasilan artis dalam meraih suara di dunia politik
3.	Pendekatan Penelitian	Kualitatif
4.	Teori	Teori Komodifikasi
5.	Hasil	Penelitian ini bahwa saat peralihan popularitas artis ditukarkan dengan <i>value</i> politik tidak menghasilkan output sejalan. Fenomena artis terjun ke politik mengartikan kurangnya proses kaderisasi di setiap parpol, modifikasi <i>value</i> popularitas artis terhadap <i>value</i> politik terapan terjadi tetapi dalam substansinya berdampak negatif terhadap masyarakat konstituen yang diwakilinya.

6.	Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan	• Perbedaan Pada riset ini memfokuskan pada “komodifikasi popularitas” selebriti guna mendulang suara dalam pemilihan legislatif 2019. • Persamaan Kedua penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama, yaitu pemilihan legislatif di kontestasi pemilu.
7.	Kritik	Pada penelitian ini tidak terlalu memaparkan mengenai metode atau pendekatan penelitian secara terperinci, penelitian ini hanya menyebutkan metode yang dipakai dan hanya menjelaskan secara singkat metode yang digunakan. Hal tersebut sebaiknya dapat dijelaskan lebih lanjut supaya peneliti selanjutnya dapat memahami lebih jauh terkait penelitian sejenis.

Tabel 2. 3 Matriks penelitian Terdahulu III Tentang POPULARITAS ARTIS SEBAGAI POLITISI

No	Item	Penelitian Terdahulu III
1.	Nama, Tahun, Judul dan Nama Kota	Rini Riyantini, Popularitas Artis Sebagai Politisi, Jakarta
2.	Tujuan Penelitian	Fenomena selebritis yang terjun di dunia politik menjadi strategi modern partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sehingga bertujuan untuk mengetahui komodifikasi profesi selebritis di dunia politik.
3.	Pendekatan Penelitian	Kualitatif
4.	Teori	Penelitian ini menggunakan teori fungsi media dan komunikasi politik.
5.	Hasil	Sehingga hasil penelitian ini diperoleh bahwa orientasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya didasarkan pada pertimbangan pengenalan popularitas sebagai kandidat dari aspek penggambaran tokoh di media, tidak memperhatikan kredibilitas, pengalaman politik dan pendidikan kandidat. Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya sebatas sosialisasi teknis pemilu, belum menyentuh aspek ideologi demokrasi.

6.	Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan	• Perbedaan Memfokuskan pada bagaimana masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu menentukan pilihannya lebih mengutamakan artis dibanding praktisi yang memiliki latar belakang politik. • Persamaan Memiliki topik penelitian yang serupa, dimana pemilihan umum dengan peserta pemilunya diluar profesi atau kalangan politik (artis-jurnalis).
7.	Kritik	Di bagian abstrak, penelitian ini tidak memaparkan teori secara eksplisit sehingga menjadikan peneliti selanjutnya kesulitan dalam mengidentifikasi teori yang digunakan pada penelitian.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Kerangka Teoritis

Sebelum melaksanakan riset, peneliti membuat sebuah kerangka teori, yang merupakan pondasi berpikir dalam memetakan perspektif peneliti menyoroti permasalahan yang sedang dilakukan. Melalui kerangka teoritis mempermudah peneliti untuk menganalisis masalah penelitian.

2.2.1.1. Tinjauan Ilmu Komunikasi

2.2.1.1.1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi (*communication*) berasal pada kata *common*, yang berarti makna, secara sederhana komunikasi adalah proses menyamakan pandangan, pemikiran serta *feeling* di antara komunikator dan komunikan. Namun secara lengkap, Supriyatno mendefinisikan komunikasi, seperti dibawah ini (Mondry, 2016):

- a. Komunikasi merupakan sistem relasi antara manusia agar dapat mengembangkan isi pikiran dan tanda-tanda yang memiliki definisi (Charles).
- b. Komunikasi ialah pemindahan stimulus/tanda-tanda. Bahasa yang digunakan komunikator kepada komunikan bertujuan mengubah perilaku individu (Carl I. Hovland).
- c. Komunikasi merupakan pemindahan tanda-tanda yang memiliki arti dan makna diantara makhluk hidup (William Albig).

- d. Komunikasi merupakan rangkaian penyampaian informasi, ilmu serta *experience* agar menimbulkan definisi, *faith*.
- e. Komunikasi diupayakan untuk menciptakan kesamaan di setiap individu.

Sementara Mulyana menyempurnakan definisi komunikasi, diantaranya (Mondry, 2016):

- a. Komunikasi adalah proses penyampaian pengetahuan, pendapat, *feeling*, *skills* dan lain-lain yang didukung dengan tanda, visual, kata, figure, dan semacamnya. *Action* diartikan sebagai komunikasi.
- b. Apapun *action* komunikasi selalu dianggap pertukaran pengetahuan yang dipengaruhi oleh stimulus antara komunikan dan komunikator.
- c. Komunikasi bisa dilakukan saat terjadinya pertukaran *massage* dari komunikator ke komunikan.
- d. Komunikasi yaitu tahapan penyampaian *idea* yang dipindahkan dari *core* kepada penerima yang bertujuan untuk merubah perilaku komunikan (Everett M. Rogers).

2.2.1.1.2. Proses Komunikasi

Proses komunikasi terdiri dari dua tahap, diantaranya sebagai berikut (Mondry, 2016):

1. Proses Komunikasi Primer

Rangkaian penyampaian pemikiran serta *feeling* pada orang lain menggunakan tanda sebagai perantara. Simbol dianggap sebagai media utama pada proses komunikasi yang mencakup bahasa, gerak tubuh, gambar, warna, dll.

Namun harus langsung bisa menerjemahkan pikiran serta *feeling* komunikator terhadap komunikan. Sejatinya adanya bahasa ialah cara paling sering digunakan pada komunikasi, karena adanya bahasa dapat menerjemahkan pikiran dan perasaan terhadap seseorang, entah berbentuk informasi, opini atau bahkan ide.

2. Proses Komunikasi Sekunder

Tahapan penyampaian *massage* dari komunikan kepada komunikator melalui bantuan alat atau media, setelah menggunakan lambang sebagai media utama. Media konvensional merupakan perkembangan komunikasi sekunder yang banyak dipakai masyarakat. Melalui perkembangan teknologi yang menggabungkan dengan bahasa, membentuk komunikasi yang lebih berwarna dan dinamis.

2.2.1.1.3. Komunikasi Politik

Pada awalnya, studi retorika politik serta propaganda politik ialah inti dari komunikasi politik. Demokrasi tumbuh bersama propaganda politik, yang mana semakin gencar dilakukan para pemimpin negara dan elit politik internasional selama PD I dan II.

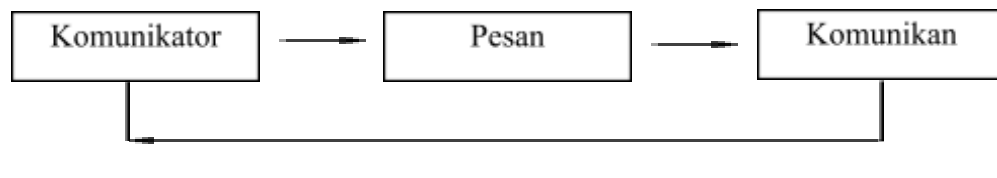
Fegen berpendapat dalam (Ahmad, 2012) komunikasi politik berarti aktivitas komunikatif politis, terbaru dan berpotensi terhadap fungsi sistem politik. Komunikasi politik juga didefinisikan oleh Meadow dalam (Ahmad, 2012), berfokus di tiap perpindahan tanda atau *massage* yang lebih dari sebagiannya terbentuk dari sistem politik.

Menurut Nimmo dalam (Ahmad, 2012), komunikasi massa menjadi lebih penting dalam komunikasi politik pada tahun 1960an seiring dengan meningkatnya pengaruh televisi pada politik. Lebih lanjut komunikasi politik didefinisikan Pippa Norris dalam (Ahmad, 2012) merupakan proses interaktif di mana informasi ditransmisikan dari hulu ke hilir antara pemerintah dan warga negara, dari atas ke bawah antara tokoh politik, dan dari atas ke bawah melewati rangkaian proses pembentukan argumen publik yang mempengaruhi mereka yang memegang kekuasaan.

2.2.1.1.4. Gambaran Proses Komunikasi

Proses umum komunikasi bisa digambarkan seperti berikut (Mondry, 2016) :

a. Model Proses Komunikasi Sederhana

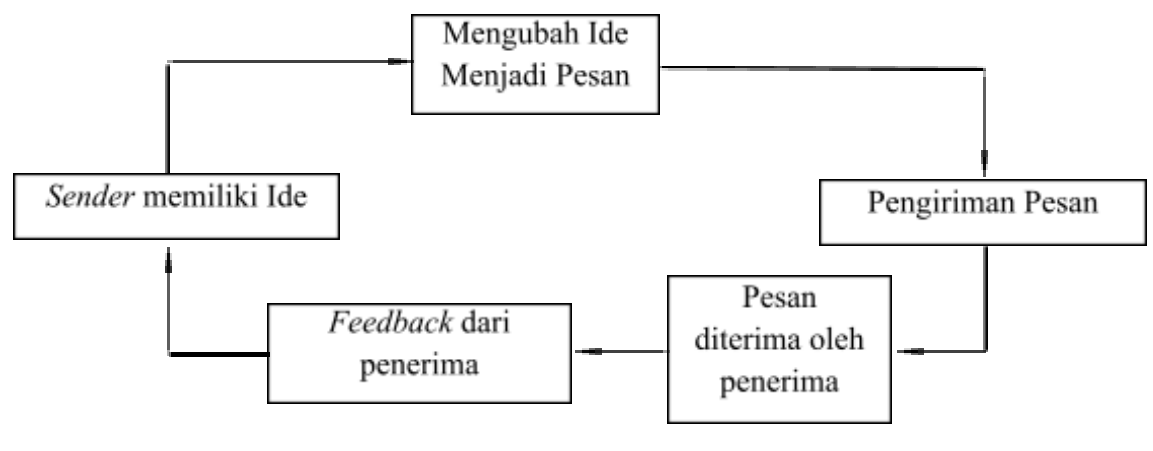


Model pertama diatas merupakan model paling sederhana pada proses komunikasi dimana komunikator atau pihak yang bertindak sebagai pengirim informasi memberikan pesan kepada komunikan atau pihak yang bertindak sebagai penerima pesan melalui proses komunikasi verbal atau non-verbal.

b. Model Komunikasi Lisan Lebih Lengkap

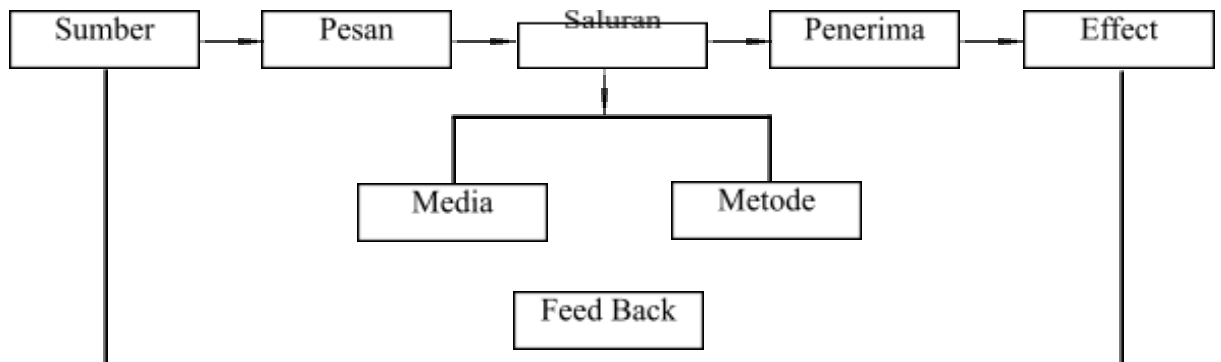
Bovee dan Thill mengungkapkan tahapan komunikasi dalam lima poin, diantaranya:

- *Sender* mempunyai ide atau gagasan
- Mengubah ide menjadi pesan
- Memindahkan pesan
- Pesan diterima oleh penerima
- Penerima membalas pesan sekaligus mengirim *feedback* untuk *sender*.



Pada model komunikasi kedua diatas, diawali dengan diubahnya ide menjadi pesan oleh komunikator yang diteruskan kepada komunikan dengan menerima pesan tersebut sehingga menghasilkan timbal balik dari komunikan terkait pesan yang telah disampaikan yang pada akhirnya membuat komunikator menemukan ide baru terkait proses komunikasi tersebut. Proses itu berulang sampai praktik komunikasi antara komunikan dan komunikator selesai.

c. Model Komunikasi Lengkap Bermedia



Model komunikasi terakhir ini disebut sebagai model komunikasi lengkap bermedia karena proses komunikasi terjadi pada media-media. Model ini diawali dengan sumber informasi yang diubah menjadi suatu pesan dan disiarkan melalui saluran dalam bentuk media dan metode sehingga pesan tersebut sampai pada penerima yang membuatnya mendapatkan efek atau timbal balik dari pesan yang telah diterima. Timbal balik tersebut menjadi acuan media dalam menemukan sumber relevan untuk dijadikan pesan sehingga proses tersebut terus berulang.

2.2.1.2. Tinjauan Ilmu Jurnalistik

2.2.1.2.1 Sejarah Jurnalistik

Sederhananya, karena surat kabar adalah media massa pertama yang dibuat oleh manusia, banyak orang mengatakan bahwa jurnalistik sama dengan pers. Tak mengherankan bahwa mayoritas orang menganggap media massa dan jurnalistik sebagai hal yang sama.

Salah satu produk jurnalistik yang paling umum adalah *Acta Diurna*, yang merupakan catatan harian yang diterbitkan selama pemerintahan Julius Cesar pada

tahun 60 SM. Acta Diurna berisi informasi yang informatif, terutama yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan Romawi. Dengan kata lain, Acta Diurna memberikan jembatan bagi raja Romawi untuk berbagi berita dan pengumuman kepada kerajaan mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa awal jurnalistik bukan dari Acta Diurna, tetapi kisah Nabi Nuh. Diceritakan bahwa sebelum Allah menurunkan bencana banjir yang mengerikan kepada kaum kafir, Dia mengirimkan malaikat kepada Nabi Nuh untuk mengajarkannya cara membuat kapal yang kokoh. Para pengikut Nabi Nuh kemudian menggunakan kapal ini untuk menyelamatkan diri dari banjir.

Suatu masa, Nuh AS mengirimkan burung dara ke alam liar dengan tujuan melihat apakah ada makanan atau tidak di kapal. Burung muda melihat ranting serta daun pohon yang mulai muncul di atas air. Burung itu mematuk ranting itu dan memberi tahu Nabi Nuh bahwa banjir sudah surut, dan dia kemudian memberitahu para pengikutnya tentang hal itu.

Menurut ahli sejarah, Nabi Nuh adalah pewarta pertama di dunia. Karena sejalan dengan metode pencarian serta penyampaian berita, para ahli sejarah menganggap Kapal Nabi Nuh adalah kantor berita yang pertama di dunia.

Berdasarkan cerita tersebut, catatan harian jurnalis biasanya melewati berbagai langkah, seperti mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan. Jurnalistik sekarang disebut pemberitaan atau kewartawanan, dan orang yang bekerja di bidang ini disebut jurnalis atau wartawan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang didukung oleh teknologi yang menghasilkan berbagai media layaknya radio, televisi dan film jurnalistik pun ikut berkembang. Kini jurnalistik tidak hanya *me-manage* laporan harian bagi sarana media cetak saja, namun merambah dan masuk ke dalam media elektronik seperti televisi dan radio. Hingga kini terus menyebar ke media online.

Jika menilik ke dalam sejarahnya, pada tahun 1920-1930 di Amerika Serikat sempat terjadi perang antara surat kabar dan radio. Hal ini disebabkan karena, surat kabar merasa tersaingi dengan keberadaan radio. Pada saat itu radio dapat menyampaikan berita satu jam sekali, sementara surat kabar hanya bisa menyampaikan berita selama sekali dalam 24 jam, hal ini membuat berita pada surat kabar tidak *update* setiap saat. Situasi pada waktu itu, keberadaan radio dianggap sebagai sebuah ancaman bagi surat kabar, bahkan banyak dari perusahaan-perusahaan yang sengaja memboikot radio dengan memberhentikan pemberitaan di radio dan menghentikan kantor-kantor yang menjual bahan berita ke radio. Namun, media radio tidak berhenti sampai Columbia News Service didirikan, yang merupakan kantor berita dimana menyediakan layanan berita bagi radio. Sehingga, perselisihan pada radio dan surat kabar akhirnya reda secara sendirinya dikarenakan pemilik masing-masing perusahaan media.

Setelah itu, muncullah televisi yang pada dasarnya sama menyajikan berita. Namun karena sifat televisi itu adalah audio visual yang menjadi daya tarik utamanya, maka media komunikasi ini dapat menarik hati penonton pada saat itu. Televisi dapat menyajikan tayangan yang dikemas secara audio dan visual, sehingga memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat. Tak heran jika

televisi lebih berwarna atau *powerfull*, apalagi di era teknologi yang semakin canggih yang mampu memainkan banyak warna sehingga dapat memberi kesan bagi masyarakat.

Kehadiran televisi memang tidak menimbulkan prahara atau ketegangan seperti munculnya radio, hal ini disebabkan karena pemilik televisi adalah seorang pengusaha radio dan surat kabar. Pada perkembangan jurnalistik selanjutnya, televisi memainkan peran besar dalam menyajikan informasi dibandingkan dengan media cetak dan radio. Karena hal tersebut dilihat dan dinilai lebih realistis sehingga yang ditampilkan lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya. Keberadaan media elektronik dan media online memang menghadirkan pengaruh besar bagi media cetak, namun dalam menghadapinya, wartawan media cetak mencoba cara dan metode baru agar khalayak dapat membaca surat kabar walaupun sebenarnya khalayak sudah mengetahuinya melalui media elektronik (Suryawati, 2011b).

2.2.1.2.2. Pengertian Jurnalistik

Jurnalistik bila dilihat dari sudut pandang: secara harfiah (etimologi), konseptual (terminology), dan praktis. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap sudut pandang, yaitu (Suryawati, 2011b):

1. Secara etimologis, jurnalistik berarti kepenulisan. Kata tersebut berarti suatu peristiwa yang akan ditulis hari ini. Tak mengherankan bahwa banyak orang menganggap jurnalistik sama dengan apa yang berkaitan dengan media cetak, khususnya surat kabar.

2. Secara terminologis jurnalistik memiliki arti, yaitu:

- Rangkaian proses praktik jurnalistik dalam menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa disebut jurnalistik.
- Jurnalistik meliputi pencarian, peliputan kejadian, dan interview.
- Jurnalistik sebenarnya adalah rangkaian dalam mengumpulkan pengetahuan dan menyebarkannya pada suatu media.

Selain itu definisi jurnalistik menurut beberapa ahli, yaitu (Suryawati, 2011b):

- Fraser Bond

Jurnalistik merupakan sajian produk berita yang dibentuk dalam suatu waktu kepada khalayak.

- Eric Hoddgins

Jurnalistik adalah proses mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan cermat dan cepat untuk mempromosikan kebenaran dan keadilan berpikir.

- Adinegoro

Jurnalistik adalah keterampilan tulis menulis untuk menyebarkan informasi kepada khalayak secara cepat dan luas.

- Onong Uchjana Effendy

Jurnalistik adalah proses pembuatan berita mulai dari pemerolehan bahan berita sampai pada penyebaran berita kepada khalayak

- Sumanang SH

Jurnalistik adalah segala hal yang berhubungan dengan kewartawanan.

- Muis

Pada umumnya jurnalistik memasukkan segala unsur yang berkaitan dengan media massa, penulisan berita dan waktu tertentu.

2.2.1.3. Teori Fenomenologi

Fenomenologi berawal dari kata “*phainomai*” berarti tampak. Fenomenologi mulai dikenalkan oleh Johan Heinrich Lambert (Nurhadi, 2015). Fondasi metodologi pada ilmu sosial didasarkan pada pemikiran Schutz terkenal mempelajari tentang fenomenologis yang sejatinya merupakan kritikan Schutz terhadap pengetahuan Weber (Schutz, 1972). Fenomena merupakan fakta yang masuk ke pada pikiran manusia secara sadar. Oleh karena itu, sesuatu berada dalam hubungan kesadaran. Fenomenologi saat ini dianggap sebagai sebuah aliran filsafat dan teknik berpikir dengan mempelajari fenomena manusia tanpa mempertimbangkan penyebabnya atau kondisi nyata yang objektif.

Sebelum Perang Dunia I, fenomenologi ialah sebuah ilmu filsafat yang pertama kali digagas di perguruan tinggi di Jerman, terutama oleh Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Jean Paul Sartre. Sartre mengungkapkan tentang fenomenologi dari perspektif eksistensialisme. Mengeksplorasi kehidupan manusia adalah fokus eksistensialisme. (Kuswarno, 2009a).

Fenomenologi mempercayai bahwa kondisi sosial terlihat penuh dengan makna transendental. Sehingga agar memperoleh hakikat dari fakta, kita harus melewati fenomena yang tampak. (Kuswarno, 2009a). Teori fenomenologi berfungsi sebagai dasar pengetahuan empiris kondisi sosial kehidupan manusia.

Metode untuk mengembangkan pemahaman tentang realitas dikenal sebagai fenomenologi. Pemahaman itu berasal dari perspektif aktor sosial yang merasakan kejadian dalam hidup mereka. Pemikiran yang dihasilkan dalam tataran personal atau pribadi merupakan hasil dari realitas atau subjektivitas yang dikonstruksi secara personal (Nurhadi, 2012). Fokus fenomenologi adalah untuk memahami bagaimana manusia dapat membangun ide penting pada konteks intersubjektivitas. Karena keterkaitan kita dan individu lain menghasilkan pemikiran kita mengenai dunia (Kuswarno, 2009a).

Penelitian fenomenologi memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mengungkap ide, atau fenomena dari pengalaman pribadi seseorang. Penelitian ini dilakukan di lingkungan natural, sehingga tidak akan terdapat batasan dalam mencermati dan memaknai fenomena yang diteliti. (Creswell, 2002) menjelaskan tiga dasar fenomenologi, di antaranya:

- a. Makna suatu benda didasarkan pada bagaimana seseorang berinteraksi bersama *things*.
- b. Ilmu di dapat dari *experience* secara alami.
- c. *Language* memberikan pemaknaan , bahasa mendefinisikan, dan mengekspresikan dunia kita. (Foss, 2009).

2.2.1.3.1. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Schutz merupakan pegawai bank yang lahir di Vienna 1899, ia wafat di New York tahun 1959. Fenomenologi merupakan disiplin ilmu tentang kejadian dimana dibagi dari sesuatu yang terbentuk, dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kategori fenomena yang terlihat (Kuswarno, 2009a). Fenomenologi mengungkapkan struktur pengalaman sadar dan kondisi yang relevan. Melalui fenomenologi, kita mampu menemukan tanda *experience* pada perspektif seseorang yang melakukannya seakan-akan kitalah yang melakukannya.

Alfred Schutz menyatakan fenomenologi ialah seperti apa mencermati pengalaman sosial menggunakan pikiran. Schutz menempatkan individu pada pikiran subjektif, khususnya dalam hal sikap serta tindakan dalam kehidupan sosial. Schutz menggunakan teori Husserl berpendapat proses dalam memahami kegiatan secara aktual serta memberikan makna kepadanya, pada akhirnya merefleksikan tingkah laku. (Kuswarno, 2009a).

Berdasarkan teori positivisme Aguste Comte, fenomena yaitu situasi yang harus diterima serta bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Mempelajari seperti apa fenomena dialami secara sadar, pikiran, dan tindakan, serta seperti apa mereka menilai atau menerima secara estetik, merupakan tujuan fenomenologi. Fenomenologi berusaha memahami seperti apa manusia membuat konsep serta makna penting dalam konteks intersubjektivitas. Hubungan intersubjektivitas menentukan bagaimana kita melihat dunia. Namun demikian pikiran yang muncul dapat dicari melalui pengalaman, dan *art* (Kuswarno, 2009a).

Fenomenologi menekankan substansi subjektif dari tindakan orang yang berusaha masuk ke dunia nyata individu yang dikajinya sehingga pada akhirnya dapat memahami apa dan bagaimana suatu hal dibentuk oleh peristiwa dan kehidupan sosial. (L. J. Maleong, 2012). Schutz kemudian mengatakan dengan menatap masa depan adalah bagian penting pada konsep tindakan. Schutz menggunakan istilah tata bahasa untuk menggambarkan suatu tindakan sebagai "tindakan yang sedang berlangsung" (*he completed act*) (Kuswarno, 2009a).

Salah satu karakteristik utama fenomenologi adalah keterlibatan individu yang dikaji di lapangan dengan kesadaran akan kejadian mereka. Tujuan dari pendekatan fenomenologis adalah untuk memahami apa arti peristiwa dan bagaimana mereka berkaitan dengan orang biasa. Dunia sosial manusia selalu bermakna dan subjektif. Oleh karena itu, pemahaman manusia tentang fenomena adalah refleksi dari pengalaman transendental dari pemahaman makna. Dalam pembahasan motif terkait teori fenomenologi sebagai berikut:

- Motif

Motif berawal dari kata "*motion*" berarti gerakan. Oleh karena itu, erat kaitannya dengan gerakan yang sering dilakukan manusia. Hal tersebut sering dianggap sebagai tingkah laku atau perbuatan. Kata motif mengacu pada stimulus yang membuat seseorang melakukan perbuatan sehingga suatu hal dapat terjadi (Sobur, 2013). Motivasi adalah konsep yang mencakup seluruh perbuatan, atau stimulus pada diri seseorang yang membuat seseorang melakukan suatu hal. Hal

ini sebenarnya memengaruhi tingkah laku manusia atau dikenal sebagai tingkah laku refleksi.

Untuk menjelaskan perbuatan individu secara umum, seseorang perlu paham apa yang sedang dilakukan, seperti apa individu melakukannya, serta kenapa individu ingin melakukannya. Pertanyaan tentang mengapa ini berkaitan dengan pemahaman motif-motif yang mendasari tingkah laku manusia. (Gerungan, 2004). Motif memiliki arti yang kompleks atau kontekstual. Oleh karena itu perlunya fase penggambaran menyeluruh tentang perbuatan individu. Tahap ini diusung Schutz sebagai perbuatan “motif untuk”, yang mengacu pada sesuatu yang akan dilakukan dimasa depan, dan perbuatan “motif karena”, yang mengacu pada masa lampau. Seperti yang dipaparkan dibawah ini:

□ **Motif Untuk (*In Order To Motiv*)**

Schutz menganalogikan seperti orang yang membuka sebuah payung ketika turun hujan, hal tersebut dilakukan agar menjaga baju tetap kering. Ia juga menerangkan konsep masa depan. Perbuatan di masa depan di rencanakan oleh individu agar mewujudkan *goals* yang telah direncanakan oleh individu tersebut (Kuswarno, 2009a).

□ **Motif Karena (*Because Motive*)**

Motif karena bisa berbentuk perilaku yang sedang dilakukan, hal tersebut karena *experience and knowledge* sebelumnya mengenai seperti apa dampaknya bila kehujanan tanpa membuka sebuah payung, hal tersebut berdampak pada pakaian yang menjadi basah. Oleh karenanya, tujuan dari perilaku bagi masa

depan dan masa lalu menjelaskan perbuatan sosial individu yang kompleks (Kuswarno, 2009b).

Sebagai sosiolog Lyman mengungkapkan istilah motif karena yang berkaitan dengan ranah psikologi. Ia menjelaskan terdapat dua jenis motif karena, yaitu pernyataan motif dan pembenaran motif. Jenis pertama, seseorang mengakui bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Jenis kedua mengakui secara penuh *responsibility* terhadap perbuatan yang tidak layak (Kuswarno, 2009b).

2.2.2. Kerangka Konseptual

2.2.2.1. Wartawan

Saat ini wartawan dipandang layaknya pekerjaan yang tidak lagi dimiliki segelintir individu yang berbakat dalam hal tulis-menulis. Wartawan zaman sekarang ialah individu yang memiliki *professionalism* layaknya dosen, psikolog, dll. Sekarang pekerjaan wartawan seperti reporter hingga kameramen diminati banyak orang. Saat awal kemunculan media cetak di Indonesia, industri pada pekerjaan ini sangatlah terbatas menjadikan pekerjaan wartawan kurang diminati karena belum sepopuler saat ini. Namun sekarang dengan kemajuan dan perkembangan media, pekerjaan wartawan diminati banyak individu seiring dengan majunya sistem ekonomi pada industri jurnalistik.

Selain menambah peluang kerja yang banyak, kemajuan media ini berdampak pada *income* individu dengan pekerjaan wartawan. Sering dijumpai wartawan bisa mengejar narasumbernya menggunakan transportasi kantor seperti mobil dan didukung oleh *gear* yang canggih dalam setiap peliputan beritanya.

Hal tersebut membuat banyak orang menganggap pekerjaan wartawan memiliki pride yang tinggi.

Wartawan jelas memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik dibandingkan dengan pekerjaan lain, terlepas dari faktor kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wartawan dianggap sebagai pekerjaan yang memerlukan kombinasi keterampilan menulis dan pengetahuan yang luas. Wartawan juga dianggap memiliki lebih banyak pengetahuan daripada pekerja lain di bidang tersebut. Wartawan tidak dinilai sebagai seseorang yang serba tahu tetapi juga dinilai sebagai orang dengan wawasan luas yang bisa mengubah informasi apapun yang dimiliki menjadi suatu produk jurnalistik dan tentunya mengundang perhatian publik (Suryawati, 2011a).

Pekerjaan wartawan mempunyai pride tersendiri, bagi sebagian orang memandang bahwa orang yang berprofesi sebagai jurnalis atau wartawan adalah profesi yang disegani oleh publik. Pasalnya wartawan dianggap kritis dan tajam dalam bertanya, sehingga mampu mengungkap informasi secara detail dan rinci serta mampu mempengaruhi orang lain melalui tulisannya. Pekerjaan wartawan sangat membutuhkan mobilitas tinggi sehingga wartawan dituntut terus aktif dalam melakukan hubungan dengan narasumber dan informan. Menariknya, seorang wartawan memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan yang berasal dari latar belakang dan status sosial yang berbeda-beda. Walaupun demikian, seorang wartawan harus menjunjung tinggi sopan santun kepada narasumbernya, karena hal tersebut dianggap “kawan” wartawan yang notabene merupakan

sumber informasi bagi berita yang nantinya diproduksi. Oleh karena itu wartawan harus pandai bergaul dengan semua kalangan (Yunus, 2012).

Wartawan merupakan seseorang yang melakukan rangkaian proses jurnalistik yang dilakukan secara berkala dan terus menerus agar tetap menghasilkan pemberitaan bagi khalayak dimana produk jurnalistik ini disajikan dalam beragam bentuk berita baik berupa cetak, elektronik ataupun online sekalipun. Sebutan bagi wartawan bisa berupa jurnalis, reporter, dll (Yunus, 2012).

Saat melakukan tugasnya, wartawan harus mempunyai mental baja, rasa jujur dan *responsibility* dalam menelusuri informasi sehingga menjadikannya sebagai produk jurnalistik. Hal tersebut agar mengukur layak tidaknya berita tersebut disajikan atau dampak apa yang ditimbulkan dari berita yang disajikan hanya wartawanlah yang tahu. Oleh karena itu, profesi wartawan tidak hanya tentang keterampilan saja tetapi juga didukung oleh mental yang kuat.

Wartawan dapat dikatakan "roh" dalam jurnalistik. Hal tersebut karena wartawan merupakan pemeran utama pada praktik kejournalistikan. Hubungan jurnalistik dengan wartawan tidaklah bisa dipisahkan, hal tersebut karena pada dunia jurnalistik, seorang wartawan bertugas dalam pencarian, pengumpulan sampai penulis berita. Nilai berita pada suatu media dipengaruhi oleh seberapa kredibel nya wartawan media itu sendiri, semakin kredibel wartawan suatu media, maka semakin berkualitas juga media tersebut dalam memproduksi suatu karya

jurnalistik. Wartawan yang kredibel mengemas berita secara objektif sehingga berita yang disampaikan sesuai dengan realita di lapangan.

Dimasa mendatang, profesi wartawan akan terus berkembang dan pesat. Wartawan dan kegiatan jurnalistik, sejatinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, dalam menjalankan tugas kewartawanannya tidak cukup bermodalkan keinginan dan semangat, tetapi juga wartawan harus memiliki keterampilan yang komprehensif seperti mahir dalam berbicara dan menulis, pintar bergaul, gesit dalam hal peliputan, terampil dalam mengalokasikan waktu dan kritis dalam bertanya.

Proses dalam menjadi seorang wartawan tidaklah singkat, perlu adanya pendidikan jurnalistik karena pembuatan karya jurnalistik tidak sesederhana menyusun rangkaian kata menjadi satu. Hal tersebut meliputi pembelajaran teoritis dan praktik yang berkaitan dengan kejournalistikan. Latar belakang seseorang dengan pekerjaan wartawan membutuhkan jiwa dan mental yang kuat karena setiap proses pembuatan berita akan membutuhkan banyak energi

Jika menengok ke sejarahnya, kebanyakan orang menilai memiliki pekerjaan wartawan tidak perlu sampai mempelajari banyak hal. Di Amerika dan Eropa orang yang melakukan pekerjaan itu disebut dengan *journalist*. Begitu pula di Indonesia, orang seringkali mengenalnya dengan jurnalis atau wartawan. Namun, saat ini jurnalis dianggap sebagai inti dan dasar industri jurnanisme. Ini wajar karena mereka adalah orang-orang yang mampu mencari, mengolah, dan

menciptakan isi produk jurnalistiknya dengan menggunakan rasa dan pikiran mereka sendiri. (Suhandang, 2010).

Wartawan juga sering disebut dengan sebutan pemimpin redaksi, redaktur, jurnalis atau reporter. Dalam hal ini para wartawan memiliki tiga arti yaitu (Kusumaningrat et al., 2014):

- a. Professional adalah kebalikan dari amatir
- b. Sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus
- c. Norma-norma yang mengatur perilakunya menitikberatkan pada kepentingan khalayak

Peningkatan studi jurnalistik menunjukkan adanya harapan yang lebih baik dalam lingkup jurnalistik. Wartawan akan menjadi profesional dengan mematuhi kode etik dan hak masyarakat yang ia liput. Hal tersebut agar wartawan mampu menghargai setiap orang yang dilibatkan dalam sebuah peliputan berita. Oleh karena itu, wartawan harus memiliki dasar moral dan tanggung jawab.

Upaya untuk meningkatkan pendidikan kewartawanan menunjukkan bahwa diharapkan profesionalisasi dalam lingkup jurnalistik akan meningkat. Wartawan akan menjadi profesional dengan menghormati martabat individu dan hak-hak warga masyarakat yang diliputnya. Untuk mencapai hal ini, wartawan harus memiliki pandangan dan pikiran yang matang. Oleh karena itu, wartawan harus memiliki dasar moral dan tanggung jawab.

2.2.2.2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu) atau pemungutan suara adalah kebijakan politik paling penting nomor tiga bagi Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dan menetapkan jenis sistem politik (Nugroho, 2021). Dalam penerapan demokrasi, demokrasi ideal dimaknai dengan praktik pemilu merupakan *tools* dari konsep demokrasi. Syarat dari demokrasi pada implementasinya adalah pemilihan pejabat politik pada pemilu dilakukan dengan bebas, langsung jujur, dan adil. (Kaesmetan, 2019).

Menurut Ramlan (1992) dalam (Kaesmetan, 2019) Pemilu adalah proses untuk memilih orang dan partai yang dipercayai dan memberikan kedaulatan bagi masyarakat suatu negara. Sesuai dengan UUD tahun 1945 No 8/2012 mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan bahwa pasal (1) pemilu ialah sarana kegiatan kedaulatan rakyat secara bebas, umum, rahasia, langsung, jujur dan adil di NKRI.

Pemilu menjadi kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil mereka secara langsung. Ini menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui dorongan perilaku pemilih yang cerdas, rasional, masuk akal, dan berkualitas tinggi. Pemilu merupakan percontohan langsung demokrasi prosedural, walaupun demokrasi tidak sama dengan pemilu, pemilu dianggap hal yang sangat penting dalam peran demokrasi itu sendiri. Sehingga banyak negara demokrasi mengimplementasikan pemilu sebagai bagian dari identitas demokrasi suatu negara. Junaidi dalam (Antari, 2018) menyatakan bahwa pemilu dan demokrasi merupakan suatu tahapan dalam meraih demokrasi, dimana dalam pemindahan kekuasaan rakyat kepada perwakilan tertentu mewakili rakyat di suatu

instansi pemerintahan. Sehingga pemilu adalah cara dalam memberikan hak bagi warga negara kepada seseorang yang untuk memperkuat kedaulatan dan memungkinkan peralihan pemerintahan yang sah.

Indonesia, seperti negara-negara demokrasi lainnya, berusaha menerapkan pemilihan umum untuk mendukung demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan umum, orang-orang akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan bagaimana pemerintahan suatu negara berjalan. Wakil rakyat terpilih menyampaikan aspirasi dan harapan warga negara dalam pemilihan umum, dan mereka diberi wewenang untuk mengawasi proses dan jalannya pemerintahan.

Sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki pilar utama dalam memilih pemimpin yaitu Pemilu. Terhitung hingga saat ini pemilu di Indonesia telah terlaksana sebanyak 12 kali dan di tahun 2024 nanti kita akan mengadakan Pemilu ke-13. Tahun 1955 adalah kali pertama Indonesia melaksanakan Pemilu, awalnya direncanakan tahun 1946 namun pemilu ini gagal terlaksana dan terpaksa mundur. Pemilu pertama ini dilakukan dua tahapan, tahap pertama pada 29 september dilakukan pemilihan anggota DPR serta di 15 Desember dilakukan pemilihan anggota Dewan Konstituante. Pada tahap pertama diikuti 36 parpol 34 perkumpulan massa serta 48 perseorangan. Pada tahap kedua, sebanyak 39 parpol 23 ormas dan 29 calon perseorangan berpartisipasi pada pemilu tersebut. Kala itu belum terbentuk KPU, jadi penyelenggara pemilu pada pemilu 1955 adalah panitia pemilihan Indonesia atau PII. Anggota PPI ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden (KompasTV, 2023).

Pemilu kedua seharusnya berlangsung pada tahun 1958 namun kembali harus mundur karena adanya masalah keamanan sehingga Pemilu kedua Baru berlangsung 13 tahun kemudian yaitu pada 3 Juli 1971. Pemilu 1971 berlangsung di era Presiden Soeharto, Pemilu ini bertujuan pemilihan DPR dan DPRD yang pesertanya merupakan 10 parpol serta satu ormas. Pemilu selanjutnya yaitu Pemilu ketiga, digelar serentak pada 2 Mei 1977 dalam pemilihan DPR dan DPRD. Jumlah peserta pemilu saat hanya tiga, berbeda dengan dua Pemilu sebelumnya yang diikuti oleh banyak peserta. Di pemilu inilah yang menjadi awal mula Pemilu diadakan secara periodik setiap 5 tahun sekali. setelah Pemilu 1977, pesta demokrasi di era orde baru dilakukan berkala dalam pemilihan DPR. Sementara presiden dan wakilnya dipilih dari hasil Sidang Terbuka MPR. Terhitung 6 kali pemilihan umum diselenggarakan di orde baru enam kali juga peserta pemilu hanya tiga partai, yang diantaranya PPP, PDI, Golkar (KompasTV, 2023).

2.2.2.3 Legislatif

Legislatif terlahir karena konsep trias politika, dalam bahasa Indonesia berarti pemisahan kekuasaan. Jika melihat tria politik yang dijelaskan Montequieu setiap kekuasaan saling bergantung satu sama lain. Tetapi dalam konsep tersebut pembagian kekuasaan tersebut dikarenakan tidak ada kekuasaan yang dapat berdiri dengan sendirinya. Pembagian kekuasaan berbeda dari pembagian kekuasaan secara materil, di mana bagian-bagiannya terpisah secara tegas namun masih memiliki fungsi bersama. (Huda, 2020).

Trias politika merupakan karya pemikir bangsa Prancis bernama Montesquieu. Ia membaginya kedalam kekuasaan negara dalam tiga hal, yakni (Huda, 2020):

1. Pembuat UU dengan Kekuasaan Legislatif.
2. Pelaksana yaitu Kekuasaan Eksekutif, dan
3. Yang menghakimi yaitu Kekuasaan Yudikatif.

Montesquieu mengajarkan kedaulatan negara terletak pada dasar hukum negara tersebut. Sehingga trias politikaa akan mudah dipelajari jika dilihat dari perspektif hukum, hal tersebut dikarenakan adanya dasar hukum yang lahir dari konsep tersebut.

Selain Montesquieu, John Locke menjelaskan tiga macam yaitu (Huda, 2020):

1. Kekuasaan Undang-Undang (legislatif)
2. Kekuasaan melaksanakan (eksekutif), dan
3. Kekuasaan untuk bertindak terhadap kepentingan warga negara atau kekuatan federasi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merupakan lembaga legislatif sekaligus lembaga tinggi pada sistem birokrasi Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia memiliki masa jabatan lima tahun, Dewan Perwakilan Amerika Serikat memiliki masa jabatan enam tahun, dan Dewan Perwakilan Bangsa-Bangsa di Inggris memiliki masa jabatan lima tahun (Huda, 2020).

Secara umum, legislatif adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat dan merumuskan undang-undang nasional yang diperlukan. Institusi ini juga disebut sebagai lembaga legislatif. Pada dasarnya, kekuasaan legislatif adalah otoritas yang diberikan kepada suatu badan untuk membuat undang-undang. Lembaga legislatif bertanggung jawab untuk membuat segala peraturan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi. Lembaga legislatif harus menetapkan peraturan yang berlaku untuk semua bidang.

Fungsi dari badan legislatif tersebut diantaranya (Huda, 2020):

1. Penentuan kebijakan serta pembuatan undang-undang. oleh karenanya, badan legislatif memiliki hak inisiatif, dimana hak tersebut dipakai dalam pengadaan amandemen untuk perancangan UU yang dibuat oleh lembaga legislatif
2. Memastikan semua perilaku yang dilakukan lembaga tidak melanggar aturan. Agar pelaksanaan fungsi ini berjalan, perwakilan rakyat diberi wewenang spesial dalam mengontrol dan mengawasi.

Adapun fungsi DPR secara umum terdiri atas (Pradana, 2019):

1. Fungsi legislasi bertujuan membuat UU yang dikaji bersama dengan presiden dalam menentukan kesepakatan bersama.
2. Fungsi anggaran bertanggung jawab untuk penyusunan dan penetapan anggaran serta mengawasi APBN.

3. Fungsi pengawasan berfungsi untuk memantau pelaksanaan UUD 1945.

Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat adalah hak-hak yang dimiliki DPR untuk menjalankan wewenangnya dengan baik. Salah satu hak interpelasi merupakan hak dalam menanyakan rincian terhadap pemerintah mengenai suatu keputusan pemerintah; hak angket ialah hak dalam menyelidiki kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar aturan perundangan-undangan; terakhir, hak menyatakan pendapat yakni hak menyuarakan suatu pendapat tentang keputusan pemerintah. (Pradana, 2019).

2.2.2.4. Calon Legislatif (Caleg)

Sederhananya, caleg adalah calon anggota legislatif dari lembaga legislatif provinsi, seperti DPR atau DPRD. Mereka juga adalah perwakilan dari partai politik. Mereka yang ingin menjadi caleg harus melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), caleg berarti calon legislator. Adib dalam bukunya yang berjudul Pendekar Bahasa dalam (Krisnawati, 2023), caleg bukanlah singkatan dari calon legislatif, melainkan calon anggota dewan legislatif atau calon anggota lembaga legislatif.

Caleg mempunyai tujuan ketika nantinya menjadi anggota legislatif, hal tersebut karena pada dasarnya anggota legislatif mewakili setiap kepentingan warga negara pada lingkup pemerintahan. Caleg diharapkan mampu mengajukan, dan mengesahkan UU berdasarkan kepentingan setiap warga negara yang sedang diwakili (Krisnawati, 2023).

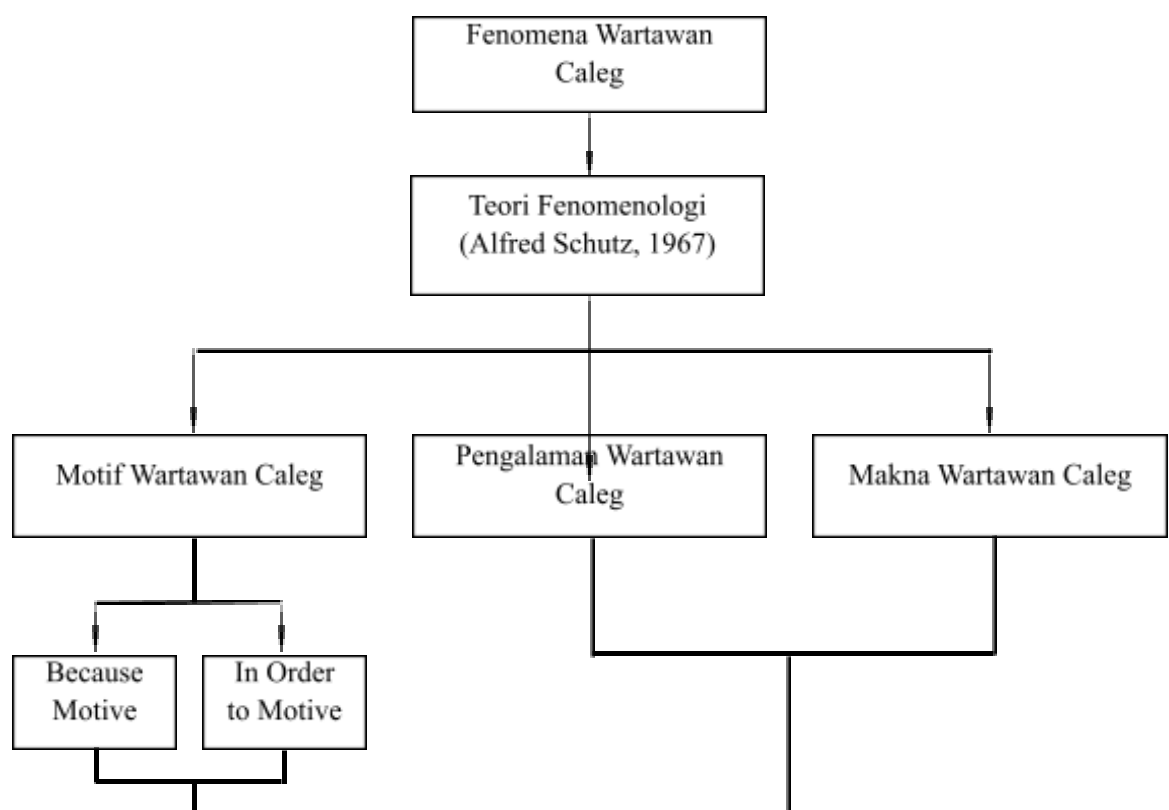
Syarat menjadi anggota legislatif tertulis pada PKPU nomor 10 tahun 2023 di Pasal 11, yakni (Krisnawati, 2023):

- Pasal 11

(1) Persyaratan administrasi Bakal Calon adalah sebagai berikut:

1. Berumur 21 tahun atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah NKRI;
4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat;
6. Setia pada Pancasila, UUD NRI 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. Tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

2.2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : (Kuswarno, 2009) Hasil modifikasi peneliti, 2024

